



## **ANALISIS KEBUTUHAN SMA DAN SMK BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK USIA 15–19 TAHUN DI KECAMATAN PANCUR BATU**

### ***ANALYSIS OF HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL SCHOOL NEEDS BASED ON THE NUMBER OF POPULATION AGED 15–19 YEARS IN PANCUR BATU DISTRICT***

**Agnes Enonita Harefa<sup>1\*</sup>, Valerina Leo Sinaga<sup>2</sup>, Cahyani Saragih<sup>3</sup>, David Pangaribuan<sup>4</sup>,  
Sahala Fransiskus Marbun<sup>5</sup>**

Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : [enonitaagnes@gmail.com](mailto:enonitaagnes@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [valerinasinaga2403@gmail.com](mailto:valerinasinaga2403@gmail.com)<sup>2</sup>, [cahyanisaragih30@gmail.com](mailto:cahyanisaragih30@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[davidferdinan18@gmail.com](mailto:davidferdinan18@gmail.com)<sup>4</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 17-11-2025

Revised : 19-11-2025

Accepted : 21-11-2025

Published : 23-11-2025

---

#### **Abstract**

*Equitable secondary education is very important for improving the quality of human resources, especially in areas with diverse geographical conditions such as Pancur Batu District. The purpose of this study is to examine the distribution of senior high schools (SMA) and vocational high schools (SMK), both public and private, evaluate the number of schools based on the population aged 15 to 19 years, and identify factors causing uneven access to education in this area. The research method used is quantitative descriptive with spatial analysis using ArcGis, supported by secondary data from BPS, the Education Office, and administrative maps. The results of the study revealed that there are nine secondary schools consisting of one public SMA, six private SMAs, one public SMK, and one private SMK. The schools tend to be concentrated in villages located along the Jamin Ginting route, while many other villages lack secondary education facilities. The analysis regarding the adequacy of facilities*

**Keywords:** *educational equality, spatial analysis, regional inequality.*

---

#### **Abstrak**

Pendidikan menengah yang merata sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di daerah dengan berbagai kondisi geografis seperti Kecamatan Pancur Batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sebaran SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, mengevaluasi jumlah sekolah berdasarkan populasi usia 15 hingga 19 tahun, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan di daerah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial menggunakan ArcGis, didukung oleh data sekunder dari BPS, Dinas Pendidikan, dan peta administrasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada sembilan sekolah menengah yang terdiri dari satu SMA negeri, enam SMA swasta, satu SMK negeri, dan satu SMK swasta. Sekolah-sekolah cenderung terpusat di desa-desa yang berada di sepanjang Jalur Jamin Ginting, sedangkan banyak desa lainnya tidak memiliki sarana pendidikan menengah. Analisis tentang kecukupan sarana menunjukkan bahwa jumlah ideal adalah empat sekolah, sehingga dari segi kuantitas, fasilitas pendidikan cukup tersedia, tetapi tidak terdistribusi secara merata. Ketidakmerataan ini dipengaruhi oleh aksesibilitas, keberadaan sekolah swasta yang dominan, serta keterbatasan dalam pembangunan sekolah negeri.

**Kata Kunci:** pemerataan pendidikan, analisis spasial, ketimpangan wilayah.



## PENDAHULUAN

Pendidikan menengah atas adalah tingkat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, berfungsi sebagai dasar untuk persiapan pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja. Pemerataan akses pendidikan di level ini menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas dan peluang bagi semua individu yang sedang bersekolah. Dalam konteks pengembangan wilayah, pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada banyaknya sekolah yang ada, tetapi juga pada cara sebarannya yang harus mengikuti penyebaran populasi dan kondisi geografi setempat. Ketidakmerataan penyediaan sekolah akan mempengaruhi peluang belajar, khususnya bagi warga di area terpencil yang memiliki akses yang sangat terbatas.

1. Pemetaan Pendidikan dan Pendekatan Spasial Pemetaan pendidikan merupakan proses untuk menggambarkan persebaran fasilitas sekolah melalui data spasial dan nonspasial.

Pendekatan ini penting karena mampu menunjukkan kondisi nyata di lapangan mengenai keterjangkauan, konsentrasi layanan, serta potensi ketimpangan antarwilayah. Menurut Asananjaya, Utomo, & Miladan (2022), pemetaan berbasis SIG dapat membantu pemerintah menilai tingkat pemerataan sekolah dan menentukan wilayah yang perlu intervensi pembangunan. SIG juga memungkinkan analisis overlay, jarak, dan klusterisasi sehingga evaluasi akses pendidikan menjadi lebih objektif. Penelitian Cahyani, Fajriyanto, & Tridawati (2025) juga menggarisbawahi bahwa analisis spasial membantu mengetahui wilayah yang kekurangan fasilitas pendidikan, terutama ketika jarak sekolah tidak sebanding dengan penyebaran penduduk usia sekolah. Dengan demikian, pemetaan bukan hanya menghasilkan visualisasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen perencanaan kebijakan pendidikan.

2. Persebaran Fasilitas Pendidikan Persebaran sekolah adalah representasi spasial dari pembangunan pendidikan.

Pola persebaran dapat berbentuk mengelompok (cluster), menyebar (dispersed), atau acak (random). Pola ini mencerminkan kualitas pemerataan pendidikan di suatu daerah. Jaslan & Ramadhan (2024) menemukan bahwa persebaran SMA di Kabupaten Agam menunjukkan pola mengelompok, yang berarti fasilitas pendidikan terkonsentrasi pada titik tertentu dan tidak menjangkau seluruh wilayah.

3. Pemerataan Akses Pendidikan Pemerataan akses pendidikan.

mengacu pada kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan belajar tanpa hambatan geografis, sosial, maupun ekonomi. Sofiani, Aisyah, & Diniati (2025) menegaskan bahwa pemerataan akses merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan pendidikan nasional. Namun, pemerataan ini seringkali terkendala oleh perbedaan kualitas layanan, jumlah sekolah, daya tampung, serta kondisi geografis.

Kecamatan Pancur Batu adalah daerah dengan karakter masyarakat yang beragam dan penduduk yang tinggal di berbagai desa. Beberapa desa terletak dekat dengan jalan utama, seperti Jalan Jamin Ginting, yang menjadi sentra kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ada desa lain yang berada di kawasan dengan akses jalan yang buruk. Kondisi geografi ini memengaruhi kemudahan bagi penduduk dalam menjangkau layanan publik, termasuk sekolah menengah. Data menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki sembilan sekolah menengah, yang terdiri dari satu SMA Negeri,



enam SMA Swasta, serta satu SMK Negeri dan satu SMK Swasta, tetapi tidak semua desa mendapatkan sebaran fasilitas yang seimbang.

SMA Negeri dan Swasta memiliki karakteristik dan peran berbeda dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. SMA Negeri biasanya berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan direncanakan berdasarkan kebutuhan wilayah. Karena itu, pemerataan sekolah negeri sering menjadi indikator strategis dalam penilaian akses pendidikan. Asananjaya, Utomo, & Miladan (2022) menunjukkan bahwa lokasi sekolah negeri yang tidak merata dapat memperbesar ketimpangan pendidikan antarwilayah. Di sisi lain, sekolah swasta cenderung berkembang di wilayah yang lebih padat penduduk dan pusat ekonomi karena faktor keberlanjutan operasional dan biaya. Jaslan & Ramadhan (2024) menyebutkan bahwa ketergantungan pasar dan lokasi strategis membuat sekolah swasta jarang hadir di wilayah pinggiran.

Kondisi ini menyebabkan peran sekolah swasta belum sepenuhnya mendukung pemerataan akses, khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki perbedaan desa inti dan desa luar. 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persebaran dan Akses Sekolah Beberapa faktor yang memengaruhi persebaran SMA Negeri dan Swasta antara lain:

1. Kebijakan Zonasi Pendidikan : Kebijakan zonasi bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah terdekat. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi distribusi sekolah. Sabur, Syamiya, & Nely (2022) menjelaskan bahwa zonasi tidak mampu mengurangi ketimpangan bila sekolah hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Zonasi akan berjalan baik bila didukung distribusi sekolah yang merata dan kapasitas sekolah yang memadai.
2. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas : Faktor jarak, ketersediaan transportasi, serta topografi sangat memengaruhi kemudahan siswa menuju sekolah. Penelitian Cahyani et al. (2025) menegaskan bahwa aksesibilitas masih menjadi isu penting terutama di wilayah dengan permukiman tersebar dan jarak antar desa yang jauh.
3. Jumlah Penduduk Usia Sekolah : 5 Wilayah dengan penduduk usia SMA yang tinggi membutuhkan lebih banyak fasilitas pendidikan. Tanpa penyesuaian dengan kondisi demografis, pembangunan sekolah akan tidak seimbang dan menimbulkan overload pada sekolah tertentu.
4. Kapasitas Daya Tampung Sekolah Menurut Asananjaya et al. (2022), daya tampung sekolah merupakan indikator pemerataan yang krusial. Sekolah yang penuh sesak menandakan ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan ketersediaan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Penting untuk menganalisis sebaran sekolah agar bisa mengetahui apakah fasilitas pendidikan yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan penduduk berusia 15 hingga 19 tahun. Meskipun secara jumlah, sekolah-sekolah di Pancur Batu lebih dari yang dibutuhkan sesuai dengan perhitungan koefisien layanan, hal ini tidak serta merta menjamin akses pendidikan yang merata. Sebaran sekolah yang terkonsentrasi di desa-desa tertentu menunjukkan bahwa distribusi fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah secara keseluruhan. Menurut berbagai penelitian sebelumnya, sekolah swasta sering kali tumbuh di daerah yang padat penduduk dan aktif secara ekonomi, sehingga wilayah pinggiran biasanya tidak mendapat layanan pendidikan menengah yang memadai.



## **METODE PENELITIAN**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis spasial berbasis data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan persebaran SMA Negeri dan Swasta di Kecamatan Pancur Batu berdasarkan data yang sudah tersedia.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada wilayah administrasi Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2025, yang meliputi pengumpulan data sekunder, validasi data melalui sumber resmi, serta analisis spasial.
3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi penelitian ini adalah seluruh SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kecamatan Pancur Batu. Karena penelitian menggunakan data lengkap dari instansi resmi, teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, dimana seluruh sekolah yang terdaftar dalam data sekunder dijadikan sampel penelitian.
4. Jenis dan Sumber Data. Data Sekunder (Data Utama Penelitian) Semua data penelitian bersumber dari dokumen resmi, yaitu :
  - a. Data daftar SMA dan SMK Negeri dan Swasta dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
  - b. Data Penduduk usia 15-19 Tahun dari BPS Kecamatan Pancur Batu
  - c. Data koordinat dan alamat sekolah dari GPS
  - d. Peta administrasi Kecamatan Pancur Batu dari Gadm
  - e. Data jumlah penduduk dan kepadatan wilayah per desa dari BPS Kabupaten Deli Serdang.
  - f. Data ini menjadi dasar pemetaan persebaran SMA, tanpa melibatkan observasi lapangan.
5. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen resmi seperti data sekolah, peta administrasi, laporan statistik pendidikan, dan data kependudukan yang relevan.
  - b. Studi Kepustakaan Mengumpulkan referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah terkait pemetaan pendidikan, pemerataan akses, dan analisis spasial.
6. Teknik Analisis Data
  - a. Analisis deskriptif kuantitatif : Jumlah sekolah, Status sekolah, Persebaran per desa
  - b. Analisis spasial SIG Langkah-langkah : Input titik lokasi sekolah, Overlay dengan peta desa, Pembuatan peta persebaran, Analisis pola (mengelompok/menyebar)
  - b. Analisis pemerataan akses Perhitungan : Rasio jumlah sekolah per jumlah desa ,Jarak rata-rata antar-sekolah ke pusat kecamatan, Perbandingan jumlah sekolah negeri vs swasta.

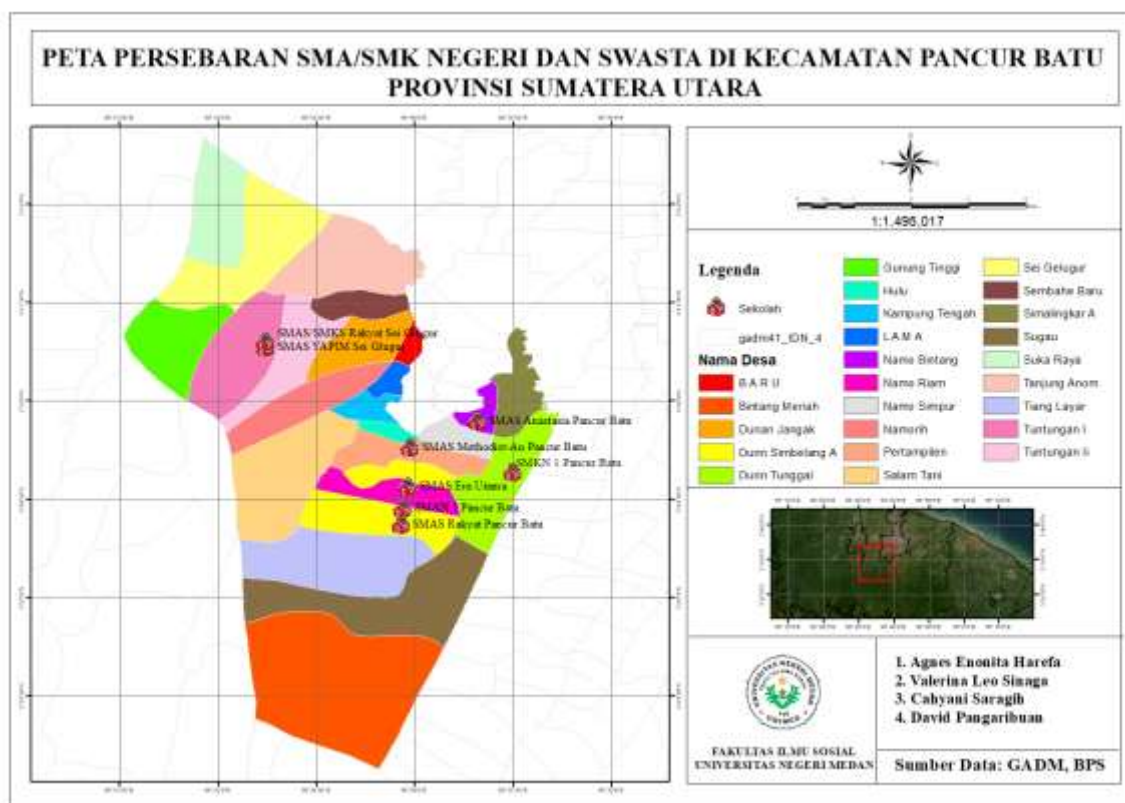


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Persebaran SMA & SMK Negeri–Swasta di Kecamatan Pancur Batu

*Gambar 1.1 Peta Persebaran SMA/SMK Negeri di Pancur Batu*



**Tabel 1** Lokasi SMA dan SMK Berdasarkan Desa di Kecamatan Pancur Batu

Desa	Sekolah
<b>Tuntungan 1</b>	SMAS & SMKS Rakyat Sei Glugur, SMA Yapim Sei Glugur
<b>Namo</b>	SMA Anastasia Pancur Batu
<b>Bintang</b>	
<b>Pertampilen</b>	SMA Methodist Pancur Batu
<b>Durin</b>	SMAN 1 Pancur Batu & SMA Rakyat Pancur Batu
<b>Simbelang A</b>	
<b>Namo Riam</b>	SMA Era Utama
<b>Durin</b>	SMKN 1 Pancur Batu
<b>Tunggal</b>	
<b>Desa lainnya</b>	Tidak memiliki SMA/SMK

Meskipun jumlah ini terlihat cukup, pemerataan spasial belum tercapai. Mengacu pada teori pemerataan Setiawan et al. (2024), pemerataan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah sekolah, melainkan dari ketersebarannya mengikuti persebaran penduduk usia sekolah. Di Pancur Batu, seluruh sekolah terkonsentrasi hanya pada 6 desa, sementara 18 desa lainnya tidak memiliki sekolah menengah.



Pola sebaran spasial menunjukkan karakteristik mengelompok (clustered pattern)—sekolah terkonsentrasi di desa yang berada dekat Jalan Jamin Ginting dan pusat aktivitas ekonomi. Pola ini sesuai teori Central Place (Christaller) yang menyatakan fasilitas pendidikan cenderung tumbuh pada pusat permukiman dan wilayah dengan aksesibilitas tinggi.

**Tabel 2** Data SMA dan SMK di Kecamatan Pancur Batu

a. Data SMA

Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Akreditasi	Tipe	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
SMAN1 PANCUR BATU	L. Jamin Ginting No. 22 Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	A	Negeri	Kelas 10 = 357 Kelas 11 = 356 Kelas 12 = 348	Guru = 73 Tenaga Pendidik = 3
SMAS ERA UTAMA PANCUR BATU	Jl. Pembangunan No. 27 Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	C	Swasta	Kelas 10 = 12 Kelas 11 = 19 Kelas 12 = 34	Guru = 4 Tenaga Pendidik =
SMAS METHODIST PANCUR BATU	Jl. JAMIN GINTING NO 36, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	A	Swasta	Kelas 10 = 93 Kelas 11 = 108 Kelas 12 = 106	Guru = 14 Tenaga Pendidik = 3
SMA SWASTA RAKYAT PANCUR BATU	Jl. LETJEN. JAMIN GINTING, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	A	Swasta	Kelas 10 = 80 Kelas 11 = 52 Kelas 12 = 63	Guru = 14 Tenaga Pendidik = 2
SMAS SWASTA ANASTASIA	Jl. Jamin Ginting, Km. 14, Simp. Gardu, Dusun V, Namo Bintang, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	B	Swasta	Kelas 10 = 28 Kelas 11 = 29 Kelas 12 = 32	Guru = 5 Tenaga Pendidik = 1
SMA SWASTA YAPIM SEI GLUGUR	Jl. Gelugur Rimbun, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	A	Swasta	Kelas 10 = 34 Kelas 11 = 53 Kelas 12 = 31	Guru = 7 Tenaga Pendidik = 2
SMA SWASTA RAKYAT SEI GLUGUR	Jl. Tanjung Anom – Lau Bakeri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	A	Swasta	Kelas 10 = 34 Kelas 11 = 37 Kelas 12 = 62	Guru = 10 Tenaga Pendidik = 1





## b. Data SMK

SMKN 1 Pancur Batu	Jl. Pancur Batu - Deli Tua Km. 3, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	B	Negeri	Kelas 10 = 357 Kelas 11 = 356 Kelas 12 = 348	Guru = 32 Tenaga Pendidik = 9
SMK Swasta Era Utama	JL PEMBANGUNAN NO.27 PANCUR BATU, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	C	Swasta	Kelas 10 = 12 Kelas 11 = 19 Kelas 12 = 34	Guru = 6 Tenaga Pendidik = -

**1. Kesesuaian Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Usia 15–19 Tahun**

Menurut data BPS Deli Serdang tahun 2024, jumlah penduduk kecamatan Pancur Batu tingkat usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 7.437 dengan jumlah laki laki 3.818 dan jumlah perempuan 3.619. Sedangkan jumlah sarana sekolah tingkat menengah ke atas di kecamatan Pancur Batu yaitu sebanyak 9 sekolah (menurut data BPS).

Untuk mengetahui apakah jumlah sarana dan prasarana pendidikan tersebut mencukupi, kita bisa menggunakan rumus kecukupan sarana sekolah. Berikut adalah perhitungan kecukupan sarana sekolah

Kecukupan sarana sekolah

$$\text{Koefisien layanan} \times \left( \frac{\text{Jumlah penduduk pendukung}}{\text{Jumlah penduduk usia yang di tentukan}} \right)$$

$$= 13.3 \times \left( \frac{7.437}{24.562} \right) = 4.02 = 4$$

Keterangan :

- Koefisien layanan merupakan angka standar yang digunakan dalam analisis kebutuhan sarana pendidikan untuk menentukan jumlah ideal satuan pendidikan pada suatu wilayah. Untuk jenjang SMA/MA/SMK, nilai koefisien layanan yang digunakan adalah 13,3, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angka ini juga digunakan secara luas dalam kajian perencanaan pendidikan di Indonesia, salah satunya pada rumus analisis kebutuhan sekolah yang tertuang dalam dokumen standar sarana-prasarana pendidikan (Kemendikbud, 2018).
- Jumlah Penduduk Pendukung adalah jumlah total penduduk yang dijadikan dasar untuk menilai apakah jumlah unit sekolah di suatu wilayah sudah memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Sementara itu, Jumlah Penduduk Usia Ditentukan merupakan total penduduk dalam kelompok usia tertentu untuk jenjang SMA, kelompok usia yang digunakan adalah 15–19 tahun.

Berdasarkan analisis menggunakan rumus evaluasi kecukupan sarana pendidikan dengan koefisien layanan 13,3, diperoleh nilai 4,02, yang kemudian dibulatkan menjadi 4. Angka ini



menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk usia 15–19 tahun sebanyak 7.437 jiwa, Kecamatan Pancur Batu secara ideal membutuhkan empat sekolah menengah atas agar kebutuhan layanan pendidikan dapat terpenuhi sesuai standar perencanaan.

## **2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemerataan Akses Pendidikan**

Berdasarkan data dan pemetaan, terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi pemerataan SMA/SMK di Pancur Batu:

- a. Lokasi strategis dan akses jalan Sekolah terkonsentrasi di desa yang berada di koridor jalan utama; desa yang akses jalannya terbatas tidak menjadi lokasi pembangunan sekolah.
- b. Dominasi sekolah swasta 7 dari 9 sekolah adalah swasta; pembangunan sekolah swasta cenderung mengikuti potensi ekonomi dan kepadatan penduduk sehingga tidak menjangkau desa terpencil.
- c. Minimnya intervensi sekolah negeri Hanya terdapat 1 SMA Negeri dan 1 SMK Negeri, sehingga kapasitas pendidikan terjangkau tidak merata bagi keluarga berpenghasilan rendah.

## **Pembahasan**

### **1. Pola Persebaran SMA/SMK Masih Mengelompok**

Hasil penelitian membuktikan bahwa persebaran SMA/SMK tidak merata, meskipun jumlah sekolah cukup banyak. Pola sebaran mengelompok terjadi karena sekolah terkonsentrasi di desa yang:

- a. berada di jalur utama lalu lintas
- b. memiliki kepadatan penduduk tinggi
- c. menjadi pusat aktivitas ekonomi

Hal ini sesuai dengan teori Christaller bahwa fasilitas publik hadir mengikuti pusat permukiman, bukan mengikuti pemerataan wilayah. Dampaknya, siswa di desa luar koridor jalan utama harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses sekolah.

### **2. Ketidakesesuaian antara Jumlah Sekolah dan Persebaran Penduduk**

Perhitungan kecukupan sekolah menunjukkan bahwa jumlah sekolah telah melebihi kebutuhan minimum (ideal 4, tersedia 9). Namun pemerataan tidak terjadi karena pembangunan sekolah tidak mengikuti persebaran penduduk usia sekolah antar desa. Temuan ini sesuai dengan penelitian Kusmanto & Rahmi (2021) yang menyatakan bahwa ketimpangan spasial fasilitas pendidikan tetap muncul meskipun jumlah fasilitas sudah cukup apabila pembangunan tidak disesuaikan dengan distribusi penduduk. Sederhananya: banyak sekolah  $\neq$  pemerataan sekolah

### **3. Ketergantungan pada Sekolah Swasta Menghambat Akses bagi Keluarga Kurang Mampu**

Dominasi sekolah swasta mengindikasikan bahwa akses pendidikan menengah di Pancur Batu sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Sutrisno (2023) bahwa kurangnya sekolah negeri mendorong ketimpangan akses karena siswa dari keluarga berpenghasilan rendah hanya dapat masuk sekolah negeri atau sekolah swasta bertarif rendah.





Konsekuensi pendidikan di Pancur Batu:

- a. Siswa dari keluarga mampu bebas memilih sekolah swasta berkualitas
- b. Siswa dari keluarga tidak mampu terbatas pada sekolah negeri tetapi hanya ada satu

Dengan demikian, pemerataan sekolah belum menciptakan pemerataan kesempatan belajar.

## KESIMPULAN

Studi mengenai distribusi SMA dan SMK di Kecamatan Pancur Batu menunjukkan bahwa walaupun jumlah sekolah menengah yang ada melebihi kebutuhan minimum berdasarkan standar layanan, akses pendidikan di area ini masih tidak merata. Di sisi lain, banyak desa yang tidak memiliki SMA atau SMK, sehingga siswa harus menempuh jarak jauh untuk menerima pendidikan. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh keberadaan sekolah swasta yang lebih banyak dibandingkan sekolah negeri, sehingga siswa dari keluarga berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau. Faktor seperti lokasi, kepadatan penduduk, kemudahan akses, dan kurangnya pembangunan sekolah negeri adalah penyebab utama mengapa akses pendidikan belum seimbang. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa banyaknya sekolah tidak selalu berarti pemerataan, karena distribusi lokasi dan kemampuan warga untuk menjangkau sekolah menjadi faktor penting dalam menilai keadilan dalam layanan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asananjaya, M., Utomo, R., & Miladan, N. (2022). Analisis Pemerataan Akses Pendidikan Menengah di Kawasan Sub-Urban. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 14(2), 112–123. <https://doi.org/10.31227/osf.io/asan2022>
- Cahyani, N. D., Fajriyanto, F., & Tridawati, A. (2025). Analisis spasial persebaran sekolah berdasarkan keterjangkauan dan kenyamanan termal menggunakan SIG di Kecamatan Kotabumi Selatan. *Datum: Journal of Geodesy and Geomatics*.
- Fadilah, R. (2024). Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Menengah sebagai Upaya Mendukung Pendidikan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 19(1), 45–58. <https://doi.org/10.25077/jep.2024.118>
- Jaslan, R., & Ramadhan, R. (2024). Analisis pola sebaran fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.16552>
- Kusmanto, A., & Rahmi, D. (2021). Pemetaan Sebaran Sekolah Menengah Atas Menggunakan Analisis Spasial. *Journal of Educational Geography*, 7(3), 201–215. <https://doi.org/10.1016/j.edugeo.2021.00412>
- Lestari, M., & Hanafiah, S. (2020). Distribusi Lembaga Pendidikan Menengah dan Dampaknya terhadap Angka Partisipasi Sekolah. *Jurnal Penelitian dan Manajemen Pendidikan Indonesia*, 20(3), 88–102. <https://doi.org/10.24114/jpmi.v20i3.2020>
- Sabur, A., Syamiya, E. N., & Nely, Y. (2022). Analisis sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1137–1144. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.693>
- Setiawan, A., et al. (2024). Pemerataan akses pendidikan di wilayah berkembang dan tertinggal: Evaluasi spasial berbasis SIG. *Sadewa: Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 6(1). <https://doi.org/10.55810/sadewa.v6i1.1200>



- Sofiani, L., Aisyah, N., & Diniati, F. (2025). Pemerataan akses pendidikan sebagai indikator pembangunan manusia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 11(1), 1–12.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, B. (2023). Kesenjangan Akses SMA Negeri dan Swasta di Wilayah Pinggiran Kota. *Jurnal Pendidikan Ekologi*, 11(4), 156–170. <https://doi.org/10.7454/jpe.2023.187>